

STREET-LEVEL BUREAUCRACY PADA PROGRAM PANGAN LESTARI

STREET-LEVEL BUREAUCRACY ON SUSTAINABLE FOOD PROGRAMS

Eddy Wahyudi*, Hasan Ismail, Saskia Nisa Setiaatmitha, Catur Ajeng Kartika Ria

Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Koresponden email: ediwahyudi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *street-level bureaucracy* pada pelaksanaan program pekarangan pangan lestari di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengambilan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan *criterionbased selection* penentuan informan ditentukan oleh peneliti berdasarkan penguasaan informasi dan data yang diperlukan, selain itu dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Proses analisis dimulai dengan mendiskripsikan coding yang telah disusun dan membangun koneksi antar tema secara terstruktur, untuk mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas), Selanjutnya dilakukan interpretasi dan pendiskripsian. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program P2L di Desa Kebontunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, Dilihat dari prespektif *Street-Level Bureaucracy* pelaksanaan program pekarangan pangan lestari di Desa Kebontunggul telah menjalankan dimensi *Diskrestion* dalam menghadapi tekanan pekerjaan, keterbatasan anggaran dan ketersediaan bibit melalui *Coping strategi*, proses pembuatan diskresi berdasarkan aspek *Representational Roles and Partisipation* yang dilakukan dengan prinsip *delibrative* melalui musyawarah bersama pengurus Kelompok Wanita Tani, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.

Kata kunci: *Street-level bureaucracy*, kelompok wanita tani, ketahanan pangan, pekarangan pangan lestari

ABSTRACT

This research aims to analyze street-level bureaucracy in the implementation of the sustainable food yard program in Kebontunggul Village, Mojokerto Regency. The method in this research uses a qualitative approach, collecting data through observation, interviews and document review. Informants in this study were determined based on a criterion-based selection. The determination of informants was determined by the researcher based on mastery of the information and data required, apart from that, in determining the informants the researcher used the snowball sampling technique. The analysis process begins by describing the coding that has been prepared and building connections between themes in a structured manner, to look for cause-and-effect relationships (causality), then interpretation and description are carried out. The results of the research show that the implementation of the P2L program in Kebontunggul Village has been implemented since 2019. Viewed from a Street-Level Bureaucracy perspective, the implementation of the sustainable food yard program in Kebontunggul Village has carried out the Discretion dimension in dealing with work pressure, budget limitations and seed availability through Coping strategies, manufacturing processes discretion based on the Representational Roles and Participation aspect which is carried out using delibrative principles through deliberation with the management of the Women's Farmers Group, Village Government and Community Residents

Keywords: *Street-level bureaucracy, farming women's groups, food security, sustainable food yards*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan berbagai pangan dan rempah-rempah karena letak geografisnya dan kondisi iklim yang sangat mendukung. Seperti halnya kebun, kebun di Indonesia biasanya berisi tanaman buah-buahan, sayuran, bumbu kuliner, obat atau biofarmasi, dan rempah-rempah yang sering disebut dengan tanaman hortikultura. Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia (Ani Tamara, 2018). Oleh karena itu ketersediaan pangan sangatlah penting, apalagi dalam situasi saat ini dimana pertumbuhan penduduk terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 adalah sebesar 1,49% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2010 -2018 adalah 1,33%. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 26 yang menyatakan bahwa salah satu upaya diversifikasi pangan adalah dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Selanjutnya, Badan Ketahanan Pangan kembali meluncurkan konsep Kawasan Rumah Pangan Berkelanjutan (KRPL) melalui Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan KRPL yang didanai oleh

bantuan pemerintah dari dana desentralisasi provinsi.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan diversifikasi konsumsi pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, berdasarkan potensi dan kearifan lokal, untuk menciptakan kehidupan yang sehat, aktif dan produktif (Yanti & Nawangsari, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan rencana KRPL merupakan program yang didorong untuk dilaksanakan setiap desa dan kelurahan. Pada tahun 2020, upaya perluasan penerima manfaat dan pemanfaatan lahan kegiatan KRPL diubah menjadi pekarangan pangan Lestari (P2L). pekarangan pangan lestari (P2L) merupakan inisiatif yang dijalankan oleh kelompok masyarakat yang bekerja sama mengolah lahan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan, serta pendapatan (Khouroh et al., 2022). Kegiatan P2L dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi bidang prioritas intervensi stunting dan/atau menangani bidang prioritas kerawanan pangan atau peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan ini memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak produktif, lahan tidur, dan lahan tidak terpakai sebagai penghasil pangan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada dasarnya P2L sendiri telah ditetapkan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pola konsumsi pangan dan gizi, serta mengoptimalkan bentuk pekarangan rumah kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang konservasi (Vebronia et al., 2022). Selain untuk menambah pengetahuan mengenai pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos, juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan rumah tangga dalam mengolah dan merawat tanaman pangan, budidaya buah dan sayur (Renaldy Dwi Tama, 2022). Selain itu, program ini bertujuan untuk lebih mengembangkan bibit tanaman guna menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan pendapatan produktif masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan ruang terbuka di halaman rumah. Berdasarkan tujuan dibentuknya program P2L, diharapkan dengan adanya program ini dapat menyeimbangkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang sosial ekonomi serta memenuhi kecukupan gizi masyarakat, karena benih yang ditanam adalah berbagai sayuran dan sayuran. buah-buahan untuk konsumsi pribadi dan bahkan untuk dijual, dibeli, dan dibangun kembali.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L), pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan intruksi kepada kepala desa untuk mengalokasikan 20% dana desa

untuk penguatan program pekarangan pangan lestari (P2L) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid 19 dan peningkatan ketahanan pangan (Britajatim.com). Selain itu menurut Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam <https://kominformojokerto.go.id/> “sampai saat ini penerjemahan pemanfaatan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan ini masih sangat bervariasi”. Berkaitan dengan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari di tingkat kabupaten/kota, diketahui bahwa Kabupaten Mojokerto sudah menjalankan program P2L namun belum berjalan maksimal.

Jumlah desa di kabupaten Mojokerto sebanyak 299 Desa, adapun jumlah desa yang sudah menjalankan program Pekarangan pangan Lestari (P2L) sebanyak 75 desa, dan jumlah desa yang belum melaksanakan program pekarangan pangan lestari (P2L) 244 Desa. Jika dilihat dari presentase dari jumlah desa yang sudah melaksanakan program pekarangan pangan lestari sebesar 25% dan yang belum menjalankan program 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) masih belum berjalan secara maksimal di Kabupaten Mojokerto. Permasalahan belum tercapainya tujuan implementasi kebijakan program (P2L) antara lain masih belum terintegrasinya pemahaman secara substantif dan secara teknis dipemerintahan level Desa sebagai ujung tombak program pekarangan pangan lestari (P2L).

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang program pekarangan pangan lestari (P2L) yang dilakukan oleh (Sika Diana dan Ana Irawati 2020) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pada penelitian ini Saran dalam penelitian ini agar program dilaksanakan sampai penjurur desa agar ketahanan pangan keluarga secara merata (Siska Diana sari, 2020). Penelitian yang dilakukan (Elisa, Agung dan Eksa pada tahun 2021) berfokus pada pencapaian dampak ekonomi dan dampak sosial dari pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) (Medi et al., 2021). Penelitian dilakukan (Umu, Cristina, Bayu dan Irary tahun 2022) fokus penelitian yang mengkaji program pekarangan pangan lestari P2L dari sisi *social entrepreneurship* dan pemasaran digital pada produk pertanian yang dihasilkan (Khouroh et al., 2022). Hasil dari kajian penelitian terdahulu tersebut *state of the art* dan kebaruan dalam penelitian ini yakni pada proses implementasi dengan melihat hubungan perilaku dari pelaksana kebijakan dengan menggunakan pisau analisis model implementasi *street-level bureaucracy*.

Berhubungan dengan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) dikaitkan dengan studi implementasi kebijakan publik, implementasi merupakan hal yang sangat krusial dalam tercapainya tujuan kebijakan, Hal ini sangat menarik

untuk dianalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan pekarangan pangan lestari di level desa dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan P2L, sehingga tim peneliti bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari (P2L) dengan perspektif *street-level bureaucracy* di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Miles dan Huberman menyebutkan karakteristik penelitian kualitatif terlihat pada tahapan-tahapan penelitian, antara lain meneliti masalah dan memahami topik utama secara detail. (Miles & Huberman, 2007). Sumber data pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan telaah dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis dari (Creswell, 2015) teknik analisis bertahap, linier, dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, namun benar-benar berhasil. tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini lebih interaktif. Proses analisis dimulai dengan mendiskripsikan koding yang telah disusun dan membangun koneksi antar tema secara terstruktur, untuk mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas), Selanjutnya dilakukan interpretasi dan pendiskripsian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian kebijakan publik, tidak terlepas dari proses implementasi kebijakan publik, Graycar dalam Keban menyatakan Kebijakan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang filosofis, produk, proses dan kerangka kerja (Keban, 2015). Dalam konsep “filsafat”, kebijakan dipandang sebagai seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai rekomendasi, dan sebagai proses kebijakan, mengacu pada cara di mana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya. Kebijakan publik mengacu pada alat implementasi yang lebih luas, mulai dari undang-undang dan peraturan hingga struktur implementasi. Siklus kebijakan publik dapat dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik mengacu pada keinginan seorang penguasa atau pemerintah dan biasanya merupakan cerminan opini umum (*public opinion*) dalam masyarakat demokratis. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan mengefektifkan kebijakan diperlukan beberapa hal, yaitu: pertama, adanya instrumen hukum (peraturan perundang-undangan) agar masyarakat mengetahui apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan harus mempunyai struktur pelaksanaan yang jelas. dan metode pembiayaan; ketiga Ketiga, diperlukan pengawasan publik (mekanisme agar masyarakat

mengetahui apakah ada pelanggaran selama penerapan kebijakan ini). Pendekatan lain terhadap kebijakan publik dapat dipahami dengan membedakan dua konsep luas yaitu kebijakan dan publik.

Menurut Howlett et al., (2009) implementasi merupakan bagian integral dari proses kebijakan publik sebagai proses dimana kebijakan dilaksanakan untuk mencapai hasil sehingga produk kebijakan siap direalisasikan dalam bentuk yang lebih realistis. Implementasi kebijakan melibatkan perumusan strategi yang lebih sederhana dan fungsional, bagaimana kebijakan nasional dapat dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran dan hasil yang ada dalam rumusan implementasi kebijakan (Salsabilla et al., 2023). Implementasi kebijakan ini memerlukan sarana (sumber daya) yang tepat untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil secara optimal. Implementasi kebijakan publik selalu mencakup tiga bagian utama, yaitu tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen ketiga biasanya tidak dijelaskan secara lebih rinci dan birokrasi harus menerjemahkannya ke dalam program dan proyek aksi

Berkaitan ketahanan pangan pemerintah telah membuat kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan diversifikasi konsumsi pangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Kehidupan (Yanti & Nawangsari, 2023). Upaya mewujudkan diversifikasi pangan, salah satunya dapat melalui optimalisasi penggunaan lahan, disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pada tahun 2010 hingga 2019, Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyelenggarakan Kampanye Daerah Rumah Pangan Berkelanjutan (KRPL) melalui Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan. Guna memperluas penerima manfaat dan penggunaan lahan, maka mulai tahun 2020 kegiatan KRPL diubah menjadi Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat P2L.



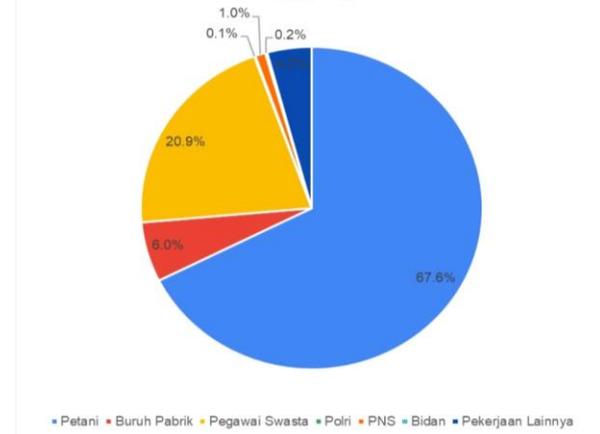
Gambar 1. Kegiatan P2L di Desa Kebontunggul

Kegiatan P2L adalah kegiatan yang memberdayakan kelompok masyarakat dalam menanam

tanaman sayuran melalui fasilitas pembibitan, pengembangan demplot, penanaman dan penanganan pasca panen. Kegiatan P2L dapat dilakukan pada lahan dan/atau lahan kosong non-produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas umum serta lingkungan lain yang memiliki batas kepemilikan yang jelas, seperti asrama, pesantren, apartemen, rumah ibadah, dan lainnya. Upaya untuk mencapai kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal (kearifan lokal), pemberdayaan masyarakat (partisipasi masyarakat) dan pendekatan berorientasi pasar (akses terhadap pasar) (Hermawan & Andrianyta, 2023).

Dalam konsep *Street-Level Bureaucracy* dijelaskan oleh Lipsky menyoroti pendekatan *bottom-up* dalam pelaksanaan kebijakan publik, berbeda dengan para ahli teori kebijakan publik terdahulu yang lebih memfokuskan pada aspek *top-down* dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan publik yang hanya melihat persoalan kepathunan terhadap aturan dan target kinerja secara organisasi, sedangkan dalam konsep *Street-Level Bureaucracy* melihat pelaksanaan kebijakan secara partisipatif, yang menjelaskan hubungan sosial di mana seorang aktor merasa berkewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak lain yang signifikan (Hupe & Hill, 2007). Praktik deliberative dan reflektif sendiri merupakan bidang kerja koseptual dan empiris yang diakui dan berkembang untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari praktik yang bersifat diskriminatif atau merupakan akibat dari pilih kasih untuk menerapkan kebijakan dengan benar (Lipsky, 2015). Lipsky memberikan perhatian khusus pada *Street-Level Bureaucracy* dalam pelaksanaan kebijakan dilihat dari keterbatasan sumber daya, tekanan beban kerja, ambiguitas kebijakan, upaya birokrasi dan hubungan dengan klien (Lipsky, 2010). Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari (P2L) pada *Street-Level Bureaucracy* di Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan program pekarangan pangan Lestari (P2L) di Desa Kebontunggul sudah dilaksanakan pada tahun 2019 saat itu program tersebut masih bernama program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) kemudian mengalami perubahan pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Dasar pelaksanaan kebijakan tersebut salah satunya di pengaruhi kondisi demografi dan geografi di Desa Kebontunggul, dilihat dari kondisi mata pencarian Masyarakat Desa Kebontunggul sebagai berikut;



Gambar 2. Mata Pencarian Desa Kebontunggul

Pada Gambar 2 diketahui bahwa 67,6% mata pencarian Masyarakat Desa Kebontunggul yakni pada sektor pertanian. Hal ini yang mendasari pemerintah Desa Kebontunggul untuk menjalankan program pekarangan pangan lestari (P2L). Adapun pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) ini pemerintah Desa Kebontunggul melibatkan kelompok wanita tani (KWT). Dilihat dari interaksi pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Kebontunggul. Berdasarkan analisis *Street-Level Bureaucracy* pada pelaksanaan program P2L dilihat dari suatu pendekatan untuk memahami perilaku dan keputusan birokrat di tingkat pelaksanaan lapangan. Michael Lipsky. Mengungkapkan analisis fenomena *Street-Level Bureaucracy* pada pelaksanaan kebijakan publik terdapat aspek *discretion, clientele, workload pressures, ambiguity and complexity, coping strategies, representational roles dan participation* dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan keputusan praktisi lapangan dalam konteks *Street-Level Bureaucracy*.

Aspek pertama yaitu *discretion* sejauh mana pelaksana lapangan program memiliki kewenangan atau kebebasan untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu, termasuk sejauh mana mereka dapat mempengaruhi hasil dan memilih tindakan tertentu. pada pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Kebontunggul, hal ini tercermin dalam kewenangan yang diberikan kepada kelompok wanita tani (KWT) untuk melaksanakan program pekarangan pangan Lestari (P2L), adapun dalam pelaksanaan program tersebut mengalami hambatan terkait sumber daya finansial dimana anggaran yang diberikan oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian serta dinas lingkungan hidup (DLH) berupa rumah bibit (*green house*), bibit dan polyback, sehingga untuk anggaran operasional dilakukan pembuatan kebijaksanaan berdasarkan prinsip *deliberative* (musyawarah bersama pengurus

KWT dan Pemerintah Desa) dilakukan pengalokasian 60% uang jalan pelatihan peserta untuk biaya operasional program pekarangan pangan lestari, hal ini dinyatakan oleh ketua kelompok wanita tani (KWT) Ibu Sadiyah “*anggaran oprasional kegiatan KWT awal mulanya kami ambil dari uang biaya pelatihan yang diberikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mojokerto, uang pendanaan pelatihan 125 ribu/orang. Uang tersebut kemudian dimasukan ke kas KWT sebesar 75 ribu dalam bentuk penyertaan modal/saham anggota KWT dalam pelaksanaan peogram P2L, kemudian sisanya 50 ribu diberikan ke warga yang mengikuti pelatihan sebagai uang bensin*” pada aspek *discretion* ini menunjukkan bahwa *Street-Level Bureaucracy* berkerja berdasarkan peraturan yang menentukan kekuasaan mereka, namun dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan mereka, menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mendefinisikan kembali peraturan tersebut, mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang interaksi antar struktur (Barrett 2004).

Pada Aspek kedua *Clientele* yaitu sejauhmana *Street-Level Bureaucracy* memahami siapa klien atau masyarakat yang berinteraksi langsung dengan praktisi lapangan. Pertimbangan karakteristik, kebutuhan, dan harapan dari klien atau masyarakat tersebut. Pada pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari (P2L) mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 83 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pekarangan pangan lestari (P2L) melalui pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal (kearifan lokal), pemberdayaan masyarakat (partisipasi masyarakat) dan pendekatan berorientasi pasar (akses terhadap pasar). Pada pelaksanaan program tersebut jenis tanaman yang dibudidayakan merupakan tanaman yang sesuai dengan letak geografis dan keperluan rumah tangga warga Desa Kebontunggul yaitu, Cabai, Terong, Tomat, Brokoli, Kubis, Timun Mas, Singkong, Semangka dan Melon. Tahapan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) di Desa Kebontunggul sudah sampai tahap penjualan hasil panen, namun belum sampai ketahapan pengolahan hasil panen menjadi produk olahan yang dipasarkan. Adapun harapan masyarakat pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) sampai pada tahapan pengolahan hasil panen menjadi produk olahan layak dipasarkan. Hal ini disampaikan oleh Bu Ngatiyah Masyarakat penerima program P2L “*saya menanam tomat, cabai dan terong, hasil panen langsung kami jual ke tengkulak, permasalahannya terkadang harganya tidak tentu, terkadang murah dan terkadang juga mahal, saat harga murah, hasilnya tidak sebanding dengan*

biaya yang dikeluarkan, harapan kami ada pelatihan dan pendampingan atau alat yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah hasil panen menjadi produk yang bisa dijual dengan nilai jual yang lebih tinggi” Upaya untuk mewujudkan harapan tersebut kelompok wanita tani (KWT) dan pemerintah Desa Kebontunggul melakukan beberapa upaya kerjasama dengan organisasi pemerintah daerah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Malang) untuk melakukan penyuluhan peningkatan produksi dalam pengolahan hasil tanam tomat menjadi produk kurma jawa (kurma tomat). Selain itu kerja sama dilakukan dengan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan hilirisasi produk pertanian khususnya singkong dan pemberian bantuan alat pengerajang singkong dan peniris melalui mekanisme kerjasama hibah pengabdian kepada masyarakat, program kerjasama lainnya juga dilakukan oleh pemerintah Desa Kebontunggul untuk meningkatkan akselerasi pengembangan ketahanan pangan dengan kerjasama dengan organisasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui pengembangan perikanan sapi perah. Dalam situasi ini dengan adanya harapan dan dorongan dari warga *Street-Level Bureaucracy* perilaku yang inovatif dengan membentuk program kerja untuk mencapai harapan warga. Selain itu untuk membangun kepercayaan publik pada pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari (P2L) *Street-Level Bureaucracy* mengalami *workload pressures*.

Aspek ketiga *workload pressures* yakni mencakup jumlah tugas yang harus mereka lakukan dan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikannya (Camillo, 2017). Pada pelaksanaan program pekarangan pangan Lestari (P2L) beban kerja yang dihadapi pemerintah Desa Kebontunggul cukup tinggi hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan di level desa. Tugas pemerintahan desa diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 6 ayat 2 Yaitu. Administrasi pemerintahan, penetapan peraturan desa, penyelesaian masalah pertanahan, peningkatan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan pekerjaan perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, pembangunan dan pengelolaan kawasan, pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan masyarakat, partisipasi sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menjaga kolaborasi dengan institusi publik dan non-pemerintah. Tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah level bawah (Pemerintah Desa) yang dijalankan cukup kompleks, hal ini belum lagi tekanan yang muncul dari warga, salah satunya terkait persoalan sarana dan prasarana pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dilihat dari RPJM Desa Kebuntunggul Tahun 2020 sampai tahun 2025. Berkaitan dengan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) merupakan bagian dari program ketahanan pangan pemerintah Desa Kebuntunggul yang dilaksanakan oleh kelompok wanita tani. Dalam melaksanakan program tersebut muncul sebuah tekanan pekerjaan antara lain, ketersediaan bibit yang terbatas, *green house* pembibitan yang dibangun oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian sudah tidak berfungsi secara maksimal, hal ini disebabkan kerusakan yang terjadi karena usia pemakian sudah lebih dari 2 tahun. Upaya yang dilakukan oleh kelompok wanita tani dalam menyediakan kebutuhan bibit antara lain dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk membuat *green house* (rumah bibit), hasil bibit yang diproduksi oleh warga kemudian di tamping oleh kelompok wanita tani dan di distribusikan ke warga yang membutuhkan bibit.

Aspek ke empat yakni *Ambiguity and Complexity* sejauh mana situasi atau kasus yang dihadapi oleh praktisi lapangan bersifat ambigu atau kompleks. *Ambiguity* yang dihadapi *Street-Level Bureaucracy* dalam pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari antara lain ketersediaan anggaran dalam menjalankan program tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tertuangnya secara implisit pada APBDes desa Kebuntunggul, Adapun yang tertuang pada APBDes tahun 2022-2023 Desa Kebuntunggul yakni anggaran ketahanan pangan senilai Rp.150.000.000, sedangkan pada program ketahanan masih terbagi menjadi beberapa program yakni perternakan sapi perah, program budidaya madu dan program pekarangan pangan Lestari. Sehingga pada tahap ini pelaksana level bawah mengalami ketidakjelasan penyusunan rencana jangka pendek untuk pengembangan program tersebut. Selanjutnya aspek *Coping Strategies* berkaitan tindakan yang diambil oleh praktisi lapangan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh kelompok wanita tani sebagai *street level* birokrasi dalam mengatasi masalah anggaran operasional yakni dengan melakukan swadaya kelompok wanita tani dengan masyarakat antara lain dengan dilakukannya iuran setiap satu bulan sekali pada tanggal 25 untuk membahas progress P2L dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya, selain itu inovasi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani dalam menjalankan program tersebut yakni dengan melibatkan warga untuk menciptakan rumah bibit (*green house*) secara mandiri, kelompok wanita tani berperan dalam melakukan pendampingan hal ini berkaitan dengan aspek ke lima yakni *Representational Roles and Partisipation* Peran

praktisi lapangan sebagai perwakilan atau advokat untuk kepentingan klien atau masyarakat yang mereka layani, pada tahap ini dalam pelaksanaan dilakukan pendampingan secara langsung oleh pengurus dan anggota kelompok wanita tani Desa Kebuntunggul, dalam proses penanaman dan perawatan tanaman.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) di Desa Kebuntunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, hal ini didorong oleh faktor demografi masyarakat mayoritas mata pencariannya disektor pertanian. Dilihat dari prespektif *Street-Level Bureaucracy* pelaksanaan program pekarangan pangan Lestari (P2L) *workload pressures* tekanan pekerjaan antara lain, ketersediaan bibit yang terbatas, *green house* pembibitan yang dibangun oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian sudah tidak berfungsi secara maksimal, hal ini disebabkan kerusakan yang terjadi karena usia pemakian sudah lebih dari 2 tahun. Selain itu juga mengalami *Ambiguity and Complexity* antara lain ketersediaan anggaran dalam menjalankan program tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tertuangnya secara implisit pada APBDes Desa Kebuntunggul. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebuntunggul dan kelompok wanita tani (KWT) dengan membuat *Diskrestion* melalui *Coping strategi* yakni dengan melakukan pemotongan uang pelatihan yang diterima oleh masyarakat sebesar 60% dan iuran rutin setiap bulan guna oprasional program, meliputi oprasional pembibitan guna memenuhi kebutuhan bibit, proses pembuatan diskresi berdasarkan aspek *Representational Roles and Partisipation* yang dilakukan dengan prinsip *delibrative* melalui musyawarah bersama pengurus Kelompok Wanita Tani, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan bantuan biaya dalam kegiatan riset yang peneliti dan tim lakukan. Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan kepada pemerintah Desa Kebuntunggul yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan bantuan data dan informasi berkaitan dengan program pekarangan pangan lestari Desa Kebuntunggul, kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Tamara, M. N. Y. (2018). Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KrpL) Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 770–776.

- Camillo, C. A. (2017). *Street-Level Bureaucracy*. 1–5. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2023). Respons Kebijakan Terhadap Potensi Krisis Pangan Global. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 400. <https://doi.org/10.31258/Jkp.V14i4.8354>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Understanding Contemporary Policy Mixes. In *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystems*.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). *Street-Level Bureaucracy And Public Accountability*. 85(2), 279–299.
- Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. *Jejaring Administrasi Publik. Th VII. Nomor, 2*.
- Khouroh, U., Ratnaningsih, C. S., Rahayudi, B., & ... (2022). Implementasi Social-Bricolage Entrepreneurship Dan Digital Marketing Sebagai Strategi Resiliensi Pelaku Program Pekarangan Pangan Lestari. *Jurnal Bisnis Dan ...*, 9(2), 150–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/Jbm.V9i2.8722>
- Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas Of The Individual In Public Services. In *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas Of The Individual In Public Services*. <https://doi.org/10.2307/2392554>
- Lipsky, M. (2015). *Debate & Analysis Street-Level Bureaucracy*: July, 376–377. <https://doi.org/10.3399/Bjgp15x685921>
- Medi, E., Wibowo, A., & Rusdiyana, E. (2021). Dampak Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2l) Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Agrica Ekstensia*, 15(2). <https://doi.org/10.55127/Ae.V15i2.99>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan). In *Penerbit Universitas Indonesia*.
- Renaldy Dwi Tama, E. P. (2022). Efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2l) Dalam Upaya Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 282–289.
- Salsabilla, K. K., Suhirmanto, S., Rahmi, A., & Masri, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 453. <https://doi.org/10.31258/Jkp.V14i4.8355>
- Siska Diana Sari, Dan A. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2l (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan. *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 2(2), 74–83.
- Vebronia, A., Febriantini, K., & Kurniansyah, D. (2022). Peran Dinas Pangan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2l) The Role Of The Food Service In The Sustainable Food Yard Program (P2l). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(4), 521–526.
- Yanti, D. D., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Urban Farming. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 251–256.